

PENGELOLAAN ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

*Oleh:
Marihartanto*

**Direktorat
Kebudayaan**

**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1996**

061
MAR
V

**PENGELOLAAN ORGANISASI
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**

*Oleh:
Marihartanto*

**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1996**

DAFTAR ISI

	Halaman
1. PENDAHULUAN	1
2. PENGERTIAN ORGANISASI	2
3. ASPEK ADMINISTRASI	5
4. ASPEK PEMBAGIAN TUGAS	13
5. ASPEK KEPEMIMPINAN	15
6. ASPEK KADERISASI	20
7. ASPEK PEMBINAAN WARGA	21
8. ASPEK PENDANAAN	23
9. ASPEK PERIZINAN	24
10. ASPEK PEMBUATAN LAPORAN DAN EVALUASI	25
11. PENUTUP	27
DAFTAR BACAAN	28

1. PENDAHULUAN

Suatu organisasi di bidang apapun, termasuk di dalamnya organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun dan bukan sebaliknya, ditutup atau dibubarkan beberapa saat setelah didirikan. Jika demikian halnya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai organisasi yang sehat. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi sehat tidaknya suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut tercakup dalam apa yang disebut *manajemen* organisasi atau *pengelolaan* organisasi. Bila manajemen atau pengelolaan suatu organisasi baik, dapat dipastikan bahwa organisasi tersebut akan tumbuh dan berkembang. Demikian pula sebaliknya.

Aspek-aspek apa sajakah yang perlu diperhatikan agar manajemen atau pengelolaan suatu organisasi baik? Inilah yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Pembahasan akan masalah tersebut dapat sangat panjang mengingat luasnya materi. Oleh karenanya, pembahasan akan dibatasi pada persoalan-persoalan yang pokok-pokok saja. Di samping itu, karena titik berat makalah ini adalah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai ciri-ciri khusus apabila dibandingkan dengan ciri-ciri organisasi pada umumnya, maka konsentrasi permasalahan adalah pada kekhususan tersebut. Tentunya pembahasan ini juga mengindahkan prinsip-prinsip bagaimana mengelola organisasi pada umumnya.

Secara umum, aspek-aspek yang akan dibahas dalam makalah ini adalah pengertian, administrasi, pembagian tugas, pembinaan warga, kepemimpinan, kaderisasi, pendanaan, perizinan serta evaluasi dan

pelaporan. Aspek-aspek ini merupakan hal yang menonjol dalam mengelola organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bab-bab berikut akan mencoba membahasnya satu persatu.

2. PENGERTIAN ORGANISASI

Mengenai pengertian organisasi, terdapat banyak sekali definisi. Beragamnya definisi mengenai organisasi tersebut dikarenakan perbedaan sudut pandang. Pada dasarnya sudut pandang tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Organisasi adalah kumpulan orang,
- b. Organisasi adalah proses pembagian kerja,
- c. Organisasi adalah sistem kerjasama, sistem hubungan atau sistem sosial.

Adapun wujud dari definisi mengenai organisasi tersebut, suatu organisasi harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Himpunan orang-orang/dua orang atau lebih
- b. Kerjasama
- c. Tujuan bersama

Tiga unsur tersebut harus dipenuhi. Jika hanya ada seorang, tidak dapat disebut organisasi karena ia hanya bekerja sendiri untuk tujuan sendiri. Bila terdapat dua orang atau lebih, tetapi orang-orang itu tidak bekerjasama, hal ini belum dapat disebut organisasi. Dua orang atau lebih yang bekerja tidak untuk tujuan bersama bukanlah kerjasama, tetapi sama-sama kerja. Apabila ada dua orang atau lebih mempunyai tujuan bersama tetapi tidak ada kerjasama, belum dapat dikategorikan sebagai organisasi yang baik, tetapi organisasi tidak kerja.

Berangkat dari pengertian organisasi secara umum seperti tersebut di atas, marilah kita mencoba memahami definisi mengenai organisasi kemasyarakatan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 menyebutkan bahwa *"Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila"*.

Organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dimasukkan dalam kriteria ini karena organisasi tersebut dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat berdasarkan kesamaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berperan serta dalam pembangunan nasional, khususnya bidang mental/spiritual. Oleh karenanya organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus mengikuti aturan-aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 beserta peraturan pelaksanaannya.

Bagaimana halnya dengan keadaan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dewasa ini? Dari kurang lebih 250 organisasi yang berhasil diinventarisasi oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, istilah yang dipakai untuk menyebut nama diri adalah :

- a. Aliran
- b. Persatuan
- c. Paguyuban (paling banyak dipakai)
- d. Perhimpunan

- e. Perkumpulan
- f. Organisasi
- g. Musyawarah
- h. Perguruan
- i. Pirukun/kerukunan
- j. Badan Penghayat Kepercayaan
- k. Kekadangan
- l. Yayasan
- m. Sebagian terbesar langsung menyebut nama, tanpa mencantumkan wadah.

Apakah penyebutan nama wadah seperti tersebut di atas dapat dibenarkan? Tentu saja dapat, karena penyebutan itu sesuai dengan nafas bentuk hubungan macam apa yang diinginkan oleh masing-masing organisasi. Bagi orang awam, yang menarik justru pengertian masing-masing penyebutan nama wadah itu. Adalah menjadi tugas kita bersama untuk mendefinisikan penyebutan nama wadah tersebut, sekaligus menyebutkan di mana perbedaannya.

Di samping perbedaan penyebutan nama wadah, ada satu hal lain yang menarik yang terdapat pada organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu perbedaan penekanan terhadap hal-hal yang diperdalam dalam suatu organisasi.

Penekanan tersebut adalah :

- a. Kebatinan
- b. Kerokhanian
- c. Kejiwaan

Apakah hal yang demikian ini dapat dibenarkan ? Tentu saja dapat, karena penekanan ini adalah ciri khas masing-masing organisasi. Kesemuanya dapat digolongkan dalam organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Banyak ilmuwan telah mendefinisikan sekaligus menunjukkan perbedaan pengertian kebatinan, kerohanian maupun kejiwaan. Apakah pendefinisian mereka sudah tepat dan merangkum apa yang sebenarnya ada, masih dapat diperdebatkan lebih jauh. Bagi orang awam, inipun sangat menarik. Sekali lagi, adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan definisi yang tepat, sekaligus menunjukkan perbedaan yang ada yang terkandung dalam istilah kebatinan, kerokhanian dan kejiwaan.

3. ASPEK ADMINISTRASI

Aspek Administrasi dalam suatu organisasi, termasuk organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah sangat penting. Dari Aspek ini terlihat baik tidaknya suatu organisasi berorganisasi. Beberapa hal yang menonjol yang perlu mendapat perhatian khusus dalam aspek ini adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, program dan kegiatan, surat-menyurat, daftar anggota, dokumentasi ajaran dan lain-lain. Mari kita membahasnya satu persatu.

a. Anggaran Dasar

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 mewajibkan agar setiap organisasi Kemasyarakatan mempunyai Anggaran Dasar. Terdapat 10 hal yang perlu diperhatikan dalam Anggaran Dasar, yaitu:

1) Nama:

Setiap organisasi penghayat kepercayaan harus punya nama. Nama memberikan ciri khusus pada organisasi tersebut. Meskipun ada organisasi penghayat kepercayaan yang bernama "Tak bernama", organisasi tersebut dapat dikatakan sudah punya nama.

2) Kedudukan/sekretariat

Setiap organisasi penghayat kepercayaan diwajibkan untuk mempunyai tempat kedudukan/sekretariat. Tempat kedudukan/sekretariat ini berfungsi sebagai tempat untuk menghubungi. Apabila suatu organisasi berpindah tempat kedudukan/sekretariat, alamat baru, hendaknya dilaporkan kepada pemerintah.

3) Azas:

Setiap organisasi penghayat kepercayaan harus mencantumkan Pancasila sebagai azasnya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi organisasi penghayat kepercayaan, tetapi juga berlaku bagi organisasi kemasyarakatan lainnya.

4) Tujuan:

Tujuan ditetapkan sesuai dengan kekhususan masing-masing organisasi. Biasanya hal umum yang terdapat dalam organisasi penghayat kepercayaan adalah membina kerukunan hidup, membina agar manusia mencapai tujuan hidup (bahagia di dunia dan di alam langgeng) dan lain-lain.

5) Usaha untuk mencapai tujuan:

Usaha untuk mencapai tujuan ini dilaksanakan dengan menyusun rencana dan program, menyelenggarakan kegiatan, membela dan menjunjung nama baik organisasi dan lain-lain.

6). Keanggotaan:

Setiap organisasi penghayat kepercayaan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan memelihara daftar anggota.

7) Pengurus

Setiap organisasi penghayat kepercayaan diwajibkan untuk menyusun struktur kepengurusan dan mengisi jabatan yang tertera dalam struktur kepengurusan. Yang biasanya ada dalam struktur kepengurusan adalah sesepuh, ketua, sekretaris, bendahara, seksi/bidang dan lain-lain. Apabila ada perubahan nama yang menduduki jabatan dalam struktur kepengurusan, hendaknya dilaporkan kepada pemerintah.

8) Pendanaan:

Yang diatur dalam pendanaan ini adalah cara untuk mencari biaya bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.

9) Lambang:

Tidak ada keharusan untuk mempunyai lambang bagi organisasi kemasyarakatan, tetapi sebaiknya setiap organisasi penghayat kepercayaan mempunyai lambang. Apa yang tertera dalam lambang adalah ciri khusus masing-masing organisasi.

10) Perubahan Anggaran Dasar:

Anggaran Dasar organisasi dapat saja diubah apabila dipandang sudah tidak sesuai lagi. Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan prosedur yang telah diatur sebelumnya. Setiap perubahan Anggaran Dasar hendaknya dilaporkan kepada pemerintah.

b. Anggaran Rumah Tangga:

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 juga mewajibkan agar setiap organisasi kemasyarakatan mempunyai Anggaran Rumah Tangga. Terdapat 6 (enam) hal yang perlu diperhatikan dalam Anggaran Rumah Tangga yaitu:

1. Keanggotaan:

Yang diatur dalam keanggotaan di sini adalah masalah penerimaan, kewajiban, hak dan pemberhentian anggota. Penerimaan mengatur syarat diterimanya seorang menjadi anggota (dewasa, sehat jasmani dan rokhani dan lain-lain), kewajiban-kewajiban anggota (menjunjung nama baik organisasi, mematuhi peraturan dan lain-lain), hak mengatur hak-hak anggota (menjadi pengurus, mengikuti pertemuan-pertemuan, dan lain-lain) dan pemberhentian mengatur tata cara pemberhentian (meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, diberhentikan secara tertulis).

2) Pengurus:

Yang diatur dalam kepengurusan di sini adalah tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus serta tugas, kewajiban dan tanggung jawab pengurus.

3) Sidang Paripurna:

Yang diatur dalam sidang paripurna di sini adalah masalah tugas sidang paripurna, peserta sidang, tata cara pengambilan keputusan serta acara dan materi sidang.

4) Pelaksanaan Keputusan:

Mengatur bagaimana keputusan sidang Paripurna dilaksanakan.

5) Pembentukan dan pembubaran cabang:

Mengatur tata cara pembentukan dan pembubaran cabang.

6) Perubahan Anggaran Rumah Tangga:

Anggaran Rumah Tangga dapat dirubah apabila dipandang sudah tidak sesuai lagi . Perubahannya harus melalui prosedur yang telah diatur sebelumnya. Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus dilaporkan kepada Pemerintah.

c. Program dan Kegiatan:

Mengenai program, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 (pasal 4) menyebutkan: "Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat kekhususannya".

Dari bunyi pasal ini dapat disimpulkan 3 (tiga) hal:

- 1) Organisasi kepercayaan harus mempunyai program
- 2) Program haruslah jelas dan realistis
- 3) Program disesuaikan dengan sifat kekhususannya, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian jelaslah bahwa program harus dibuat dan dilaporkan kepada Pemerintah.

Bagaimana halnya dengan program itu sendiri? Sudah kita ketahui bersama bahwa program terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1) Program Jangka Panjang:

Direncanakan untuk kurun waktu kurang lebih 25 tahun dan memuat arah kebijaksanaan umum yang akan dituju selama waktu itu.

2) Program Jangka Menengah:

Direncanakan untuk kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun dan memuat hal-hal yang lebih praktis yang merupakan penjabaran program jangka panjang.

3) Program Jangka Pendek:

Disebut juga program tahunan karena direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka 1 (satu) tahun. Tentunya segala sesuatu yang dibuat di sini adalah kegiatan-kegiatan nyata yang akan dilaksanakan dalam tahun yang berjalan.

Pembabakan program ini haruslah sinkron satu dengan lainnya, dalam arti bahwa program jangka menengah haruslah mengacu pada

program jangka panjang dan program jangka pendek haruslah mengacu pada program jangka menengah dan panjang. Tidaklah dibenarkan apabila masing-masing program lepas-lepas dan berdiri sendiri-sendiri, sehingga satu dengan lainnya tidak saling berkaitan.

Jenis program bisa sangat bervariasi, bergantung pada ketetapan masing-masing organisasi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah program hendaknya tidak muluk-muluk, sehingga sulit untuk dilaksanakan. Program hendaknya nyata dan realistis agar pelaksanaannya mudah. Setiap ada perubahan dalam program hendaknya dilaporkan kepada pembina umum maupun teknis.

d. Surat-menyurat

Surat-menyurat merupakan kegiatan utama organisasi dan dilakukan setiap harinya. Dalam kegiatan surat-menyurat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Nomor Surat:

Setiap surat yang dikeluarkan haruslah diberi nomor untuk memudahkan pihak lain membalas surat dan mencari arsip surat apabila ingin dilihat kembali.

2) Buku Agenda:

Buku agenda diperlukan untuk mencatat surat keluar dan surat masuk. Surat keluar dan surat masuk perlu dipisahkan pencatatannya, sehingga harus diadakan 2 (dua) buku agenda yaitu Agenda Surat Keluar dan Agenda Surat Masuk. Surat keluar dan surat masuk dicatat dalam buku agenda secara kronologis.

3) Arsip Surat:

Baik surat keluar dan masuk perlu diarsip secara baik. Oleh karenanya setiap surat keluar harus dibuatkan tembusan (ditiik rangkap). Surat dapat diarsip menurut nomor, tanggal, masalah, tujuan/asal surat dan lain-lain.

Setiap terjadi pergantian pengurus, hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat ini hendaknya diserahkan kepada pengurus baru, sehingga dapat ditelusuri kesinambungan masalah-masalah yang perlu diurus oleh suatu organisasi.

e. Daftar Anggota

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 menyebutkan bahwa: "Organisasi Kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan".

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan 2 (dua) hal:

- 1) Organisasi penghayat kepercayaan harus melakukan pendaftaran anggota;
- 2) Organsasi penghayat kepercayaan harus memelihara daftar anggota.

Kedua hal tersebut di atas perlu dilakukan untuk menjaga tertib administrasi. Dengan demikian, daftar anggota harus selalu diperhatikan. Daftar anggota tersebut perlu senantiasa diperbaharui, sesuai dengan masuk dan keluarnya anggota. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah setiap pengunduran diri atau pemberhentian

seorang anggota dari suatu organisasi harus dinyatakan secara tertulis. Apabila terjadi pergantian pengurus, daftar anggota hendaknya diberikan kepada pengurus baru.

f. Dokumentasi Ajaran

Dokumentasi ajaran sangat penting dilakukan oleh suatu organisasi penghayat kepercayaan. Dokumentasi ini sebaiknya secara tertulis. Hal ini perlu diperhatikan agar apabila seorang sesepuh/pinisepuh suatu organisasi meninggal dunia, ajaran yang ada tidak hilang bersama meninggalnya sesepuh/pinisepuh tadi. Masalah yang sering dijumpai dalam organisasi penghayat kepercayaan adalah lemahnya bidang ini. Kebiasaan menularkan ajaran dalam masyarakat penghayat kepercayaan adalah secara lisan. Apabila kebiasaan ini tidak dibarengi pendokumentasian secara tertulis terhadap segala sesuatu yang diajarkan, pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ada pada ajaran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak akan berjalan dengan baik.

4. ASPEK PEMBAGIAN TUGAS

Pembagian tugas dalam suatu dalam organisasi adalah penting. Pembagian tugas diartikan sebagai perincian serta pengelompokkan tugas-tugas yang semacam atau yang erat hubungannya untuk dilakukan oleh orang tertentu. Alasan pentingnya pembagian tugas adalah:

- a. Masing orang berbeda pembawaan, kemampuan, kecakapan, serta keterampilan.
- b. Orang yang sama tidak dapat berada di dua tempat yang berbeda pada saat yang sama.

- c. Seseorang tidak dapat mengerjakan dua hal pada saat yang sama.
- d. Ilmu pengetahuan dan keahlian sangat luas sehingga seseorang hanya mampu menguasai sebagian dari ilmu dan pengetahuan itu.

Melihat alasan pentingnya pembagian tugas di atas, sudah selayaknyalah bila pimpinan suatu organisasi penghayat kepercayaan membagi tugas-tugas yang ada diantara mereka. Jangan sampai terjadi apa yang diistilahkan dengan *one man show*, yaitu seseorang mengerjakan semua tugas, dari yang paling remeh sampai dengan pengambilan keputusan yang penting bagi organisasi. Bila lingkup organisasi masih kecil dan terbatas, hal ini masih mungkin dilakukan tapi apabila lingkungannya besar, ini sudah tidak mungkin lagi.

Tugas-tugas yang ada tidak demikian saja dibagi. Pembagian tugas hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Masing-masing petugas harus mempunyai perincian tugas yang jelas.
- b. Seseorang petugas jangan dibebani dengan tugas yang terlalu banyak.
- c. Variasi tugas yang dibebankan kepada seseorang hendaknya diusahakan yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain.
- d. Penempatan seseorang dalam suatu jabatan hendaknya tepat.
- e. Penambahan atau pengurangan petugas hendaknya berdasarkan volume kerja.

Tugas yang ada hendaknya dibagi habis, artinya tidak ada satu tugas pun yang tidak ditangani oleh seseorang. Dengan demikian dapat diharapkan roda organisasi akan berjalan lancar.

5. ASPEK KEPEMIMPINAN

Dalam suatu organisasi dikenal adanya pemimpin. Syarat untuk menjadi pemimpin ialah:

- a. Mengetahui jalan yang membawa pada tujuan yang benar.
- b. Menunjukkan jalan itu.
- c. Menempuh jalan itu sendiri.

Pemimpin harus mengerti sungguh-sungguh akan tujuan, cara dan jalan yang ditempuh. Ia yakin bahwa tujuan itu baik dan berguna bagi anggotanya. Kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah kuat. Kemudian barulah dia dapat membimbing dan menunjukkan jalan dan tujuan kepada orang lain dengan mengingat situasi, tempat dan waktu, karena dia adalah pemuka, pemersatu, dan pamong. Dia harus konsekuen untuk berani menempuh jalan itu sendiri.

Bagaimana syarat seorang pemimpin itu? Dalam khasanah literatur tentang kepemimpinan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, hal ini banyak sekali dibahas. Beberapa tipe kepemimpinan yang dari dalam negeri akan kami kutipkan di sini.

a. Kepemimpinan Pancasila:

- 1) *Ing ngarso sung tulodo* artinya seorang pemimpin harus mampu lewat sikap dan perbuatannya, menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya.
- 2) *Ing madyo mangun karso*, artinya seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya.

- 3) *Tutwuri handayani*, artinya seorang pemimpin harus mampu dan berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

b. Petuah Begawan Abiyasa kepada Arjuna:

- 1) *Heneng*

Seorang pemimpin harus mempunyai sifat tenang dalam menghadapi segala macam persoalan. Ketenangan membantu seseorang memecahkan persoalan.

- 2) *Hening*

Seorang pemimpin harus bersih agar dapat senantiasa berinisiatif dan berkreasi.

- 3) *Heling*

Seorang pemimpin harus senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ingat kepada yang dipimpin.

- 4) *Hawas*

Seorang pemimpin harus waspada terhadap segala kemungkinan

c. Kepemimpinan Hastabrata

- 1) *Watak Matahari (Surya)*

Setiap pemimpin harus dapat berfungsi laksana matahari, yaitu dapat memberi semangat, memberi kehidupan dan memberi energi kepada orang-orang yang dipimpinnya.

2) *Watak Bulan (Candra)*

Setiap pemimpin harus dapat berfungsi laksana bulan, yaitu menyenangkan dan memberi terang dalam kegelapan kepada anak buahnya.

3) *Watak Bintang (Kartika)*

Setiap pemimpin harus dapat berfungsi laksana bintang, yaitu bertakwa dan dapat menjadi contoh teladan dan pedoman bagi anak buahnya.

4) *Watak Angin (maruta)*

Setiap pemimpin harus dapat berfungsi laksana angin, yaitu dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat dan mau menyelami kehidupan anak buahnya.

5) *Watak Mendung (Hima)*

Setiap pemimpin harus dapat berfungsi laksana mendung, yaitu berwibawa tetapi tindakannya bermanfaat bagi anak buahnya.

6) *Watak Api (Dahana)*

Setiap pemimpin harus dapat berfungsi laksana api, yaitu bertindak adil, mempunyai prinsip, tetap tegak dan tegas tanpa pandang bulu.

7) *Watak Samudra (Samodro)*

Setiap pemimpin harus dapat berfungsi laksana samudra, yaitu berpandangan luas, rata, sanggup menerima persoalan dan tidak boleh membenci seseorang.

8) *Watak Bumi (Bantala)*

Setiap pemimpin harus dapat berfungsi laksana bumi, yaitu sentosa budinya dan jujur serta mau memberi anugerah kepada siapa saja yang telah berjasa.

d. Ajaran Catur Pariksa:

- 1) *Sama*, artinya tidak membedakan siapapun;
- 2) *Beda*, artinya memberikan penghargaan yang berbeda sesuai dengan karya yang dibuat;
- 3) *Dhana*, artinya selalu bermurah hati;
- 4) *Denda*, artinya apabila terjadi penyelewengan, jangan tanggung-tanggung memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat.

e. Ajaran Catur Paramita:

- 1) *Materi*, artinya menganggap setiap anggota masyarakat di sekitar kita sebagai sahabat;
- 2) *Kurnia*, artinya membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita;
- 3) *Upeksha*, artinya tidak menghiraukan omongan mengejek jika kita berbuat kebaikan;
- 4) *Mudita*, artinya bertindak wajar sehingga selalu dapat menarik simpati orang lain.

f. Ajaran Asta Dasa Paramitang Prabu dari Maha Patih Gajah Mada:

- 1) *Wijaya*, artinya bersikap tenang dan bijaksana

- 2) *Mantriwira*, artinya berani membela yang benar;
- 3) *Natanggan*, artinya mendapat kepercayaan rakyat;
- 4) *Satya Bakti A Prabu*, artinya taat kepada pemimpin/pemerintah;
- 5) *Wagmi Wak*, artinya pandai berbicara dan meyakinkan pendengar;
- 6) *Wicaksaneng Maya*, artinya cerdik menggunakan pikiran;
- 7) *Sarjawopasana*, artinya selalu bersikap rendah hati;
- 8) *Dirotsaha*, artinya rajin dan tekun bekerja;
- 9) *Tan Satresna*, artinya tidak terikat/mengikatkan diri pada salah satu golongan atau persoalan;
- 10) *Masihi Semesta Buwana*, artinya bersikap kasih sayang kepada sesama;
- 11) *Sih Semesta Buwana*, artinya dikasihi semuanya;
- 12) *Negara Gening Pratidnya*, artinya selalu mengabdikan dan mendahulukan kepentingan negara;
- 13) *Dibya Cita*, artinya toleran terhadap pendirian orang lain;
- 14) *Sumantri*, artinya tegas dan jujur;
- 15) *Anyeken Musuh*, artinya selalu dapat memperdaya lawan;
- 16) *Waspada Prabu Wisesa*, artinya selalu waspada dan introspeksi dalam memutuskan masalah;
- 17) *Ambeg Para Martha*, artinya pandai mendahulukan hal-hal yang lebih penting;
- 18) *Prasaja*, artinya hidup sederhana.

Pemilihan tipe kepemimpinan mana yang terbaik, diserahkan kepada masing-masing orang. Pemilihan tersebut bergantung dari sifat orang, tempat dan waktu serta situasi yang sedang berlangsung. Bisa saja beberapa syarat-syarat dari masing-masing tipe kepemimpinan itu diambil dan dilaksanakan.

6. ASPEK KADERISASI

Kata kader berasal dari bahasa Perancis *cadre*. *Cadre* adalah personil inti tetap suatu resimen. Daya juang resimen bergantung pada kadernya, yang merupakan tulang punggung dan pusat semangat. Hanya orang-orang terpilih dan berpengalaman dalam pertempuran serta mengetahui dan dapat mempergunakan alat-alat tempur, di samping selalu taat dan berinisiatif, yang dapat disebut kader. Kader juga berarti *elite*, yaitu orang yang terpilih dan yang terbaik. Kader adalah jantung suatu organisasi karena dia bertindak dan bekerja untuk kepentingan bersama.

Setiap organisasi memerlukan kader. Kader merupakan inti dari suatu organisasi. Untuk keperluan ini, perlu suatu usaha untuk mendidik dan menumbuhkan kader. Makin kuat kader suatu organisasi, makin kuat pula organisasi tersebut. Jika kadernya melemah, organisasi yang bersangkutan akan ikut juga melemah.

Ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam kaderisasi, yaitu:

- a. Memilih kader;
- b. Mendidik kader;

Pemilihan kader tidak dapat sembarangan saja dilakukan. Seorang kader haruslah memiliki kelebihan-kelebihan, antara lain:

- a. Kelebihan di bidang mental/rohani;
- b. Kelebihan di bidang ilmu pengetahuan;
- c. Kelebihan di bidang ketrampilan;
- d. Kelebihan untuk mengetahui lingkungannya;
- e. Kelebihan di bidang ideologi negara.

Kelebihan-kelebihan ini tidak begitu saja datang, tetapi memerlukan pendidikan. Oleh karenanya organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu membina pendidikan kader ini.

Pendidikan kader dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Pendidikan langsung berlaku bagi suatu organisasi besar, yang banyak mempunyai kader. Pendidikan ini dilaksanakan dengan mengundang kader yang ada, mengkonsentrasikan mereka pada suatu tempat selama jangka waktu tertentu dan memberikan pendidikan kepada mereka mengenai segala sesuatu yang dianggap penting untuk diberikan. Pendidikan tidak langsung berlaku untuk suatu organisasi kecil. Pendidikan ini dilaksanakan dengan melibatkan kader pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi (magang). Di samping itu, para kader tersebut juga dimasukkan dalam jenjang pendidikan resmi yang diselenggarakan oleh pihak lain, yaitu sekolah (untuk ilmu pengetahuan), penataran (untuk keterampilan, ideologi negara) dan lain-lain.

7. ASPEK PEMBINAAN WARGA

Pembinaan warga bagi suatu organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat penting, karena inilah inti kegiatan dari suatu organisasi penghayat kepercayaan. Seperti telah kita ketahui bersama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan 3 (tiga) hal utama, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi luhur. Kesemuanya ini dilaksanakan dalam rangka membentuk pribadi yang utuh dan untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Mengingat pentingnya kegiatan pembinaan warga ini, sudah selayaknyalah apabila suatu organisasi penghayat kepercayaan mengadakan kegiatan ini secara periodik tetapi tetap. Nama dan bentuk kegiatan tentunya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing organisasi. Demikian pula masalah siapa yang memberikan pembinaan, diserahkan kepada masing-masing organisasi. Yang penting dalam hal ini adalah kesinambungan pelaksanaan pembinaan ini. Jangan sampai terdapat masa-masa kosong di mana pembinaan tidak dilakukan. Bagi suatu organisasi penghayat kepercayaan yang besar, yang mempunyai banyak cabang, perlu pula diperhatikan agar masing-masing cabang yang ada mengadakan pembinaan serupa. Apabila untuk cabang-cabang tersebut warganya tidak dibina oleh pimpinan dari pusat organisasi, hendaknya pembinaan dapat dilakukan oleh pimpinan dari cabang setempat.

Pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi penghayat kepercayaan kepada warganya adalah tidak mudah, karena menyangkut masalah perilaku. Hasil dari pembinaan tersebut tidak segera bisa dilihat dan dapat berlangsung sepanjang hidup seseorang. Karena pembinaan ini menyangkut masalah perubahan tingkah laku dan orang yang dibina tersebut akan selalu mengacu pada pembinaan yang telah diterimanya, maka diharapkan hendaknya pembinaan tersebut selalu mengait pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, para pembina perlu menguasai pula peraturan perundangan tersebut, sehingga pembinaan yang diberikan tidak akan lepas dari jalur ini.

Akan halnya materi yang diberikan dalam pembinaan, diserahkan kepada masing-masing organisasi. Satu hal yang perlu dicatat dalam hal ini adalah para warga dibina untuk memiliki budi luhur yang terkandung

dalam ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus didorong untuk mengamalkan budi luhur tersebut. Tanpa hal ini kiranya peran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka ikut membina mental/rohani para warganya, tidak akan cukup dirasakan.

8. ASPEK PENDANAAN

Untuk menjalankan roda organisasi, organisasi penghayat kepercayaan diperbolehkan untuk menghimpun dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari:

- a. Iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan;
- b. Sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- c. Usaha lain yang sah.

Khusus untuk sumbangan yang diperoleh dari luar negeri, pelaksanaannya harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan persetujuan Pemerintah Pusat adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen lainnya setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pada prakteknya hampir tidak ada organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai dana yang berlimpah, karena penekanannya memang pada pembinaan budi luhur dan tidak mencari keuntungan. Dana yang tersedia semata-mata hanya untuk menjalankan roda organisasi. Beberapa organisasi

penghayat kepercayaan menyelenggarakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana. Ada yang mengusahakan koperasi, mendirikan bank ataupun perusahaan jamu. Usaha-usaha semacam ini patut ditiru. Tetapi memang tidak semua dapat melakukan hal ini karena keadaan masing-masing organisasi berlain-lainan. Usaha apa yang akan dibuat, diserahkan pada inisiatif dan kreativitas masing-masing organisasi.

Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak memberikan bantuan yang berupa uang maupun peralatan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang tersedia baik rutin maupun proyek pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terbatas. Di samping itu, Bappenas belum mengizinkan penyediaan dana dan peralatan bagi organisasi penghayat kepercayaan dan dana yang tersedia dipergunakan untuk membina peri kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain diwujudkan dalam kegiatan sarasehan, pembinaan pamong, penggalian nilai-nilai luhur, penyebarluasan informasi melalui RRI dan media massa dan lain-lain.

9. ASPEK PERIZINAN

Setiap organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memerlukan izin sebelum melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang. Izin diminta dari kepolisian secara berjenjang sesuai dengan lingkup peserta kegiatan. Mengenai pihak mana yang dimintai izin, dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Mabes Polri apabila undangan berasal dari seluruh Indonesia;
- b. Polda yang bersangkutan apabila undangan berasal dari satu propinsi;
- c. Polres yang bersangkutan apabila undangan berasal dari kabupaten/kotamadya;
- d. Polsek yang bersangkutan apabila undangan berasal dari satu kecamatan.

Permintaan izin disampaikan secara tertulis, biasanya disertai dengan berbagai dokumen seperti nama kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta yang hadir dan asal peserta, jadwal acara, susunan panitia dan lain-lain. Umumnya sebelum mengeluarkan izin pihak Kepolisian akan meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada pembina umum yaitu Departemen Dalam Negeri, sesuai dengan jenjangnya dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembina teknis sesuai dengan jenjangnya. Setelah adanya rekomendasi, baru izin dapat dikeluarkan.

10. ASPEK PEMBUATAN LAPORAN DAN EVALUASI

Hal yang sering dilupakan setelah diadakannya suatu kegiatan adalah pembuatan laporan. Laporan perlu dibuat karena penting untuk dokumentasi intern organisasi. Jika diperlukan, laporan tersebut dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu. Laporan juga diperlukan untuk kegiatan evaluasi. Laporan dibuat sesuai dengan jenis kegiatan, biasanya meliputi:

- a. Pendahuluan
- b. Tujuan

c. Pelaksanaan.

- 1) Waktu
- 2) Tempat
- 3) Penyelenggara
- 4) Penyelenggaraan
- 5) Peserta yang hadir
- 6) Jadwal acara

d. Hasil-hasil yang dicapai

e. Penutup.

Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memerlukan laporan dari organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menetapkan program-programnya. Laporan dari organisasi kepercayaan ini dapat disampaikan dalam triwulanan, tengah tahunan, atau tahunan. Dengan adanya laporan tersebut, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang diadakan oleh organisasi penghayat kepercayaan dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menetapkan program-program mana yang sesuai dan diperlukan oleh organisasi penghayat kepercayaan.

Evaluasi perlu dilakukan setelah dilaksanakannya suatu kegiatan. Evaluasi diperlukan untuk menentukan perlu tidaknya suatu kegiatan diadakan lagi, dan jika memang akan diadakan lagi, aspek-aspek mana yang dianggap lemah dan perlu dibenahi sehingga hasil yang dicapai pada masa mendatang dapat meningkat. Evaluasi dilakukan dengan melihat faktor penghambat suatu kegiatan. Jika sudah ditemukan, faktor

penghambat tersebut dicoba untuk dihilangkan dengan mencari jalan keluarnya. Alternatif jalan keluar terbaik dicoba dilaksanakan pada kegiatan berikutnya. Dengan demikian, kegiatan sama yang kurang berhasil akan memberikan hasil yang lebih baik di masa mendatang. Evaluasi dilakukan secara terus menerus sampai diperoleh hasil optimal. Apabila evaluasi dilakukan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi penghayat kepercayaan secara konsisten, maka dapatlah diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi penghayat kepercayaan akan semakin maju.

11. PENUTUP

Demikian uraian tentang pokok-pokok yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makalah ini tentunya jauh dari sempurna dan perlu perbaikan di sana-sini. Namun ada pepatah mengatakan "Tidak ada rotan akarpun jadi". Makalah ini lebih berfungsi sebagai akar daripada rotan. Semoga ada manfaatnya.

DAFTAR BACAAN

1. Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987.
2. Mulder, Niels, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1983.
3. Riberu Dr. J. , *Dasar-dasar Kepemimpinan*, Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS) , 1982
4. Subagya, Rahmat, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1976.
5. Sutarto, Drs, *Dasar-dasar Organsiasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985
7. Wursanto, Drs. Ig., *Pokok-pokok Perencanaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.

Perpust
Jende